

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi IKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (*capital intensive*). Eksistensi IKM memang tidak dapat diragukan lagi, karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, IKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002).

Pemberdayaan IKM ditengah arus globalisasi dan tingginya persaingan, membuat IKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual IKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang semakin membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat IKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).

Kendala lain yang dihadapi IKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas, serta perencanaan visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya IKM bersifat *income gathering*, yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Sesuai perkembangan dan pengaruhnya IKM selalu menjadi tonggak sejarah bagi perekonomian Indonesia, bahwa IKM merupakan penyokong perekonomian Negara yang tahan akan krisis ekonomi yang dimana di saat-saat dunia mengalami krisis di setiap Negara, IKM selalu tetap hidup dan berdiri menggerakkan perekonomian Negara Indonesia. Sesuai dengan teori ekonomi makro, perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak rumah tangga (*household*), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan, namun IKM masih tetap bertahan.

Keberadaan industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. IKM selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup pengaman di masa krisis, melalui mekanisme penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah. Peran

dan fungsi strategis ini sesungguhnya dapat ditingkatkan dengan memerankan IKM sebagai salah satu pelaku industri komplementer bagi pengembangan perekonomian nasional dan bukan subordinari dari pelaku industri lainnya. Keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan IKM, berarti memperkuat bisnis perekonomian masyarakat. Hal ini akan membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah itu sendiri.

Oleh sebab itu Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan potensi bisnis yang sangat digalakkan oleh pemerintah. Karena semakin banyak masyarakat berwiraindustri maka semakin baik dan kokohnya perekonomian suatu daerah karena sumber daya lokal, pekerja lokal, dan pembiayaan lokal dapat terserap dan bermanfaat secara optimal.

Namun, meskipun IKM memiliki sejumlah kelebihan yang memungkinkan IKM dapat berkembang dan bertahan dalam krisis, tetapi sejumlah fakta juga menunjukkan bahwa tidak semua Industri kecil dapat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Banyak IKM mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman akibat melonjaknya suku bunga lokal, selain itu adanya kesulitan dalam proses produksi akibat melonjaknya harga bahan baku yang berasal dari impor.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja usaha perusahaan, diantaranya lingkungan makro seperti kebijakan pemerintah, kekuatan hukum dan politik, perubahan teknologi. Lingkungan makro merupakan

lingkungan jauh yang berada diluar organisasi namun menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan.

Dalam hal ini, perkembangan Kabupaten Pekalongan dari berbagai aspek menjadikan Kabupaten Pekalongan sebagai daerah dengan lingkungan bisnis yang memiliki prospek untuk tumbuh dan kembang khususnya bagi Industri Kecil Menengah (IKM). Keberadaan IKM merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, dan menjadi indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan lingkungan (lingkungan eksternal) yang terjadi mengakibatkan adanya peluang IKM untuk tumbuh dan berkembang.

Industri Kecil Menengah (IKM) batik merupakan salah satu jenis usaha yang dapat mewakili dan cukup prospektif dalam perkembangan Kabupaten Pekalongan yang telah ada sejak dahulu hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya indutri batik yang berkembang di Kabupaten Pekalongan. Bahkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, industri yang sedang berkembang dan menjadi salah satu ikon di Indonesia adalah industri batik. Batik merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi dunia, patut dilestarikan kebudayaannya secara maksimal, dan batik merupakan industri kerajinan yang merupakan usaha turun-menurun dari generasi ke generasi.

Kabupaten Pekalongan adalah salah satu daerah penghasil batik yang terkenal dan menjadi ikon batik di Jawa Tengah. Secara geografis,

Kabupaten Pekalongan digolongkan sebagai kota pesisir, dan produksi batik Kabupaten Pekalongan sangat beragam dan sangat dinamis didalam penerapan motif. Industri kecil maupun industri konveksi besar bersaing dalam pemasaran batik Pekalongan yang menyebar dan meluas di luar Kabupaten Pekalongan.

Batik telah menjadi topangan hidup bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pekalongan dan mendapatkan dukungan pemerintah dari segi bantuan dana IKM batik sampai pengalokasian pedagang batik yang dijadikan satu lokasi. Ini terbukti dengan keberadaan batik dalam lokasi yang telah ada, seperti Pasar Grosir Batik Wiradesa dan *International Batik Center* (IBC) Wiradesa. Bagi pecinta batik, Pekalongan merupakan tempat yang tepat untuk mencari batik dan aksesorisnya, karena Pekalongan adalah tempat pasar serta grosir batik, baik batik asli (batik tulis) maupun batik cap, batik printing, batik *painting* maupun sablon dengan harga yang bervariasi.

Adapun Tabel data Presentase Industri Kecil Menengah (IKM) Batik di Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2011–2015 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Industri Kecil Menengah (IKM) Batik**  
**Kabupaten Pekalongan**  
**Tahun 2011–2015**

Tahun	Kecil		Menengah		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2011	765	-	330	-	1.095	-
2012	774	1,18	332	0,61	1.106	1,00
2013	770	-0,52	329	-0,90	1.099	-0,63
2014	767	-0,39	330	0,30	1.097	-0,18
2015	771	0,52	333	0,91	1.104	0,64

Sumber: Disperindagkop dan IKM Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut menginformasikan bahwa IKM Batik di Kabupaten Pekalongan mengalami fluktuasi yang cenderung tidak stabil. Pada tahun 2012 jumlah pertumbuhan IKM batik mengalami peningkatan sebesar 1,00% dari tahun 2011. Pada tahun 2013 jumlah pertumbuhan IKM batik mengalami penurunan sebesar -0,63% dari tahun 2012, begitu juga pada tahun 2014 jumlah IKM batik mengalami jumlah pertumbuhan yang menurun sebesar -0,18% dari tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah pertumbuhan IKM Batik mengalami peningkatan sebesar 0,64% dari tahun 2014. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa percepatan perubahan lingkungan yang menimbulkan ketidakpastian lingkungan bisnis, diduga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Pekalongan. Dengan kata lain walaupun cukup prospektif, berbagai faktor lingkungan makro dapat mempengaruhi usaha ini, terlebih lagi usaha ini merupakan jenis usaha yang terbuka dan mudah dimasuki oleh kompetitor, serta dinamis akan perubahan lingkungan makro. Faktor-faktor lingkungan makro yang mempengaruhi kinerja industri batik di Kabupaten Pekalongan terdiri dari: politik dan hukum, ekonomi, teknologi dan sosial budaya.

Munizu (2010), menjelaskan bahwa faktor-faktor eksternal yang terdiri atas aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, dan aspek peranan lembaga terkait mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja usaha mikro dan kecil. Berkaitan dengan aspek lingkungan, Wilkinson (2002), menyatakan bahwa usaha kecil dan mikro

akan tumbuh bilamana lingkungan aturan atau kebijakan mendukung, lingkungan makro ekonomi dikelola dengan baik, stabil, dan dapat diprediksi: informasi yang dapat dipercaya dan mudah diakses, dan lingkungan sosial mendorong dan menghargai keberhasilan usaha tersebut.

Tri Handayani (2013), mengungkapkan faktor lingkungan makro yang meliputi kekuatan politik dan hukum, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi serta kekuatan sosial budaya menjadi salah satu pertimbangan IKM makanan dalam menentukan strategi usaha demi mencapai keuntungan yang maksimal serta kinerja usaha yang baik.

Budi Lofian dan Sisno Riyoko (2014), menyimpulkan bahwa pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, aspek sosial ekonomi, dan aspek peran lembaga terkait dan faktor internal seperti sumber daya manusia, aspek keuangan, teknik operasional dan aspek pasar berpengaruh terhadap kinerja IKM mebel rotan di Jepara.

Mengacu pada hasil penelitian terdahulu, tampak bahwa bukti empiris tersebut menunjukkan pentingnya lingkungan eksternal dalam mendukung kinerja usaha. Penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Faktor Lingkungan Makro terhadap Kinerja Industri Batik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Dari uraian latar belakang diatas, untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah dalam

penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan makro diukur dengan menggunakan aspek politik dan hukum, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya.
- b. Kinerja industri diukur dengan rasio pertumbuhan usaha batik.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah aspek politik dan hukum berpengaruh terhadap kinerja industri batik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan?
- b. Apakah aspek ekonomi berpengaruh terhadap kinerja industri batik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan?
- c. Apakah aspek teknologi berpengaruh terhadap kinerja industri batik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan?
- d. Apakah aspek sosial budaya berpengaruh terhadap kinerja industri batik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh aspek politik dan hukum terhadap kinerja industri batik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk menguji pengaruh aspek ekonomi terhadap kinerja industri batik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.



- c. Untuk menguji pengaruh aspek teknologi terhadap kinerja industri batik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
- d. Untuk menguji pengaruh aspek sosial budaya terhadap kinerja industri batik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya:

##### **a. Manfaat Akademik**

Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bukti empirik mengenai ada atau tidaknya pengaruh lingkungan makro yang meliputi aspek politik dan hukum, ekonomi, teknologi dan sosial budaya terhadap kinerja industri batik. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Industri Batik, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan berkaitan dengan kinerja industri batik.
- 2) Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja industri batik di Kabupaten Pekalongan.